

## **STRATEGI DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI DALAM MELAKUKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER (PSBS) PADA SEKTOR PARIWISATA DI KOTA DENPASAR**

**Ni Luh Nyoman Trinita<sup>1</sup>, Ni Putu Anik Prabawati<sup>2</sup>**  
[mingta2003@gmail.com](mailto:mingta2003@gmail.com)<sup>1</sup>, [prabawati@unud.ac.id](mailto:prabawati@unud.ac.id)<sup>2</sup>  
**Universitas Udayana**

### **ABSTRAK**

Pengelolaan sampah di sektor pariwisata menjadi tantangan serius di Kota Denpasar seiring meningkatnya aktivitas pariwisata dan jumlah timbulan sampah. Pemerintah Provinsi Bali telah menerapkan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) sebagai strategi utama untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir dan mendukung pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam menerapkan PSBS pada sektor pariwisata di Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan di wilayah Renon, Denpasar, serta studi literatur terhadap regulasi dan dokumen pendukung. Analisis data dilakukan menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam penerapan PSBS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSBS didukung oleh regulasi yang kuat dan komitmen kelembagaan, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana prasarana, anggaran, serta konsistensi pemilahan sampah di lapangan. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran pelaku usaha pariwisata dan peluang kerja sama lintas sektor menjadi potensi penting dalam penguatan PSBS. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pengelolaan sampah berbasis sumber perlu dilakukan secara terintegrasi melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya, pemanfaatan peluang eksternal, serta pengawasan yang berkelanjutan guna mendukung terwujudnya pariwisata berkelanjutan di Kota Denpasar.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, PSBS, Strategi, Pariwisata, Kota Denpasar.

### **ABSTRACT**

*Waste management in the tourism sector has become a serious challenge in Denpasar City due to the increasing tourism activities and the growing volume of waste generation. The Provincial Government of Bali has implemented Source-Based Waste Management (PSBS) as a key strategy to reduce the burden on landfills and support sustainable tourism. This study aims to analyze the strategy of the Bali Provincial Tourism Office in implementing PSBS in the tourism sector of Denpasar City. The research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, field observations in the Renon area of Denpasar, and literature review of relevant regulations and supporting documents. Data analysis was conducted using SWOT analysis to identify strengths, weaknesses, opportunities, and threats in the implementation of PSBS. The results indicate that PSBS implementation is supported by strong regulatory frameworks and institutional commitment; however, it still faces challenges such as limited infrastructure, budget constraints, and inconsistent waste segregation practices. On the other hand, increasing environmental awareness among tourism stakeholders and opportunities for cross-sector collaboration present significant potential for strengthening PSBS implementation. This study concludes that an integrated strategy is required through regulatory reinforcement, capacity building, optimal utilization of external opportunities, and continuous supervision to support sustainable tourism development in Denpasar City.*

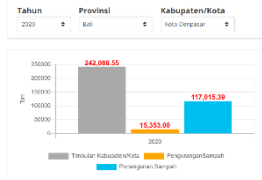
**Keywords:** Source-Based Waste Management, PSBS, Strategy, Tourism, Denpasar City.

### **PENDAHULUAN**

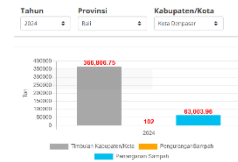
Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis bagi Indonesia, dan Bali menjadi pusat aktivitas wisata terbesar yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Penelitian di Kawasan Pariwisata Jimbaran menemukan bahwa perkembangan

pariwisata pesat menyebabkan peningkatan volume sampah, sementara kemampuan pemerintah daerah terbatas, sehingga pengelolaan hanya mencakup pemilahan awal, penjualan residu, dan pembuangan ilegal di beberapa area. Studi lain menyoroti timbunan sampah tinggi di daya tarik wisata, berpotensi merusak citra pariwisata Bali, dengan pemerintah merespons melalui Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan sampah plastik sekali pakai. Komunitas seperti RecycleIndonesia terlibat dalam gerakan mengurangi sampah plastik secara spontan atau terorganisir untuk mendukung kebijakan tersebut. Putra, dkk (2008)

Timbunan sampah tahun 2020



Timbunan sampah tahun 2024



Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2024, Kota Denpasar tercatat sebagai penyumbang sampah terbesar di Bali dengan jumlah sekitar 366.806.75 ton per tahun atau rata-rata 1.004,95 ton setiap hari. Tren ini menunjukkan peningkatan signifikan dari 2020-2024 (dari 349.500 ton/tahun menjadi 366.807 ton/tahun), didorong pariwisata pasca pandemi, dengan sampah plastik naik 20-25 persen. Bahkan, pada tahun 2025 volume sampah harian diperkirakan meningkat hingga mencapai puncak sekitar 1.050 ton per hari. Komposisi sampah di Denpasar didominasi oleh sampah organik yang berkisar antara 65-68 persen, terutama berasal dari sisa makanan dan limbah kebun. Sementara itu, sampah plastik menyumbang sekitar 17 persen, dengan sektor rumah tangga sebagai sumber utama timbunan sampah, yaitu sekitar 64 persen dari total keseluruhan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali mulai menerapkan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) sebagai strategi utama. Sistem ini menekankan pentingnya pemilahan sampah organik, anorganik, dan residu sejak pertama kali dihasilkan. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 dan diperkuat melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. Regulasi tersebut mewajibkan pelaku usaha pariwisata, masyarakat, dan instansi pemerintah untuk melakukan pemilahan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta membentuk unit pengelola sampah di masing-masing lingkungan. Walaupun kerangka regulasi sudah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Bali belum sepenuhnya terintegrasi dari hulu ke hilir. Praktik pembuangan sampah sembarangan masih ditemukan, dan infrastruktur pengolahan belum sejalan dengan pertumbuhan timbunan sampah harian. Situasi ini turut menimbulkan penumpukan sampah di sungai dan saluran air, yang memicu sumbatan ketika curah hujan meningkat.

Yanti, dkk (2025) Menjelaskan bahwa efektivitas penerapan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) di Bali sangat dipengaruhi oleh koordinasi antara desa adat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Koordinasi ini menjadi kunci agar pemilahan sampah berjalan dari tingkat rumah tangga hingga ke TPS3R. Suidiana, dkk (2025) juga menemukan bahwa keberhasilan PSBS ditentukan oleh faktor pendukung seperti komitmen pemerintah, peran desa adat, serta manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan fasilitas dan SDM. Selain itu, Kalpikawati, dkk (2023) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pengelolaan sampah di desa wisata merupakan fondasi penting untuk mencapai lingkungan pariwisata yang berkelanjutan dan mendukung pencapaian program

PSBS.

Tantangan pengelolaan sampah juga berkaitan erat dengan pola konsumsi wisatawan yang cenderung menghasilkan limbah plastik sekali pakai. Beberapa pelaku industri pariwisata telah memulai inisiatif ramah lingkungan, seperti penyediaan fasilitas pemilahan, pengurangan plastik, serta kerja sama dengan bank sampah dan pengolah daur ulang. Namun, praktik ini masih bersifat sporadis dan belum membentuk sistem terpadu di seluruh rantai pariwisata. Selain faktor sosial dan kelembagaan, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah juga belum berkembang optimal. Sistem monitoring digital, aplikasi pencatatan timbulan sampah, hingga inovasi pengolahan berbasis energi terbarukan masih terbatas. Ketiadaan data akurat dan terintegrasi sering menghambat pengambilan keputusan, karena kondisi lapangan tidak selaras dengan kapasitas penanganan yang tersedia.

Pada tingkat masyarakat, keberhasilan PSBS sangat ditentukan oleh perubahan perilaku serta pemahaman mengenai pentingnya pemilahan sejak rumah tangga. Minimnya sosialisasi yang berkelanjutan menyebabkan sebagian warga belum memahami prosedur pemilahan secara benar, sehingga sampah yang sudah dipisahkan berpotensi bercampur kembali saat proses pengangkutan (Observasi Lapangan, renon, Denpasar, 17 september 2025). Kondisi ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih intensif melalui keterlibatan tokoh adat, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat sipil agar pesan lingkungan lebih mudah diterapkan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji secara mendalam penerapan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) di sektor pariwisata Kota Denpasar. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Bali, observasi lapangan, serta studi literatur terhadap regulasi dan dokumen pendukung. Observasi lapangan dilaksanakan di wilayah Renon, Denpasar, dengan fokus pada praktik pemilahan dan pengelolaan sampah di fasilitas pariwisata. Selain itu, peneliti juga melakukan pemantauan terhadap implementasi PSBS pada pelaku usaha pariwisata selama periode September hingga Desember 2025. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh gambaran empiris yang komprehensif mengenai kondisi aktual, hambatan, serta dinamika pelaksanaan PSBS di lapangan.

Metode ini juga selaras dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. (Yanti, dkk, 2025) menelaah implementasi PSBS pada tingkat desa adat dan menemukan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan, terutama terkait koordinasi antar pemangku kepentingan serta kapasitas sumber daya lokal. Kemudian, (Kalpikawati, dkk, 2023) menggunakan analisis kualitatif untuk mengkaji penerapan PSBS di desa wisata, dan hasilnya menunjukkan bahwa efektivitas program sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat, kesiapan fasilitas, serta konsistensi edukasi lingkungan. Temuan dari berbagai studi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan kualitatif mampu menangkap dinamika sosial, kelembagaan, dan teknis dalam pengelolaan sampah di Bali secara lebih mendalam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) merupakan pendekatan pengelolaan sampah yang menekankan pemilahan sejak dari sumbernya, seperti rumah tangga, pelaku usaha, dan fasilitas pariwisata. Penerapan PSBS bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir serta meningkatkan efisiensi proses pengolahan sampah. Dalam konteks sektor pariwisata, PSBS berperan penting dalam

menjaga kebersihan destinasi dan mendukung prinsip pariwisata berkelanjutan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa efektivitas PSBS sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi pelaku pariwisata dan konsistensi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Untuk menganalisis strategi penerapan PSBS, penelitian ini menggunakan teori analisis SWOT menurut dari (Rangkuti, 2017) dalam teguh bagasputra widjanarko (2024) yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam implementasi PSBS di sektor pariwisata. Hasil dari pengamatan yang telah dilakukan berdasarkan dengan teori analisis SWOT adalah sebagai berikut;

### **1. Strength (Kekuatan)**

- a. Regulasi dari pemerintah: Dinas Pariwisata Provinsi Bali memiliki dasar hukum dan regulasi yang mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber, seperti Peraturan Daerah atau kebijakan terkait kebersihan dan lingkungan. Regulasi ini menjadi landasan kuat dalam merancang dan mengimplementasikan program PSBS di destinasi wisata.
- b. Struktur organisasi yang efektif: Dinas Pariwisata memiliki struktur organisasi yang terkoordinasi dan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Keharmonisan antar bidang memungkinkan pelaksanaan program PSBS berjalan lancar dan terintegrasi.
- c. Sumber daya manusia yang memadai: SDM di Dinas Pariwisata kompeten dan berpengalaman dalam mengelola sektor pariwisata. Mereka memiliki kapasitas untuk mengembangkan program PSBS dan membina pelaku pariwisata dalam penerapannya.

### **2. Weakness (Kelemahan)**

- a. Keterbatasan anggaran: Anggaran operasional untuk pelaksanaan PSBS masih terbatas, sehingga pemerataan dan optimalisasi program di seluruh destinasi wisata belum maksimal.
- b. Sosialisasi program yang belum optimal: Media sosialisasi program PSBS masih terbatas dan belum menjangkau semua kelompok usia, khususnya masyarakat lanjut usia yang kurang akses ke teknologi.
- c. Prasarana yang belum memadai: Fasilitas dan prasarana pendukung PSBS, seperti tempat pengumpulan dan pengolahan sampah, masih terbatas dan belum merata di semua destinasi wisata.
- d. Kurangnya inovasi dalam pengelolaan sampah: Program PSBS belum banyak mengadopsi inovasi teknologi atau pendekatan modern dalam pengelolaan sampah, sehingga potensi efisiensi dan nilai tambah belum tergalai maksimal.

### **3. Opportunities (Peluang)**

- a. Sampah pariwisata berpotensi jadi nilai tambah ekonomi: Sampah yang dihasilkan sektor pariwisata dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi, seperti daur ulang atau produk kerajinan, sehingga memberi peluang bagi masyarakat dan pelaku pariwisata.
- b. Kemajuan teknologi pendukung pengelolaan sampah: Teknologi informasi dan aplikasi digital dapat dimanfaatkan untuk memudahkan pelacakan, pengelolaan, dan edukasi program PSBS di destinasi wisata.
- c. Potensi kerja sama dengan pihak swasta dan komunitas: Kolaborasi dengan pihak swasta, hotel, restoran, dan komunitas wisata dapat memperluas jangkauan dan efektivitas program PSBS.

### **4. Threats (Ancaman)**

- a. Peningkatan jumlah wisatawan dan penduduk: Jumlah wisatawan dan penduduk yang terus bertambah berdampak pada peningkatan volume sampah, sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih efektif dan efisien.

- b. Maraknya pembangunan industri pariwisata baru: Pertumbuhan industri pariwisata dapat menambah volume sampah baru dan membutuhkan pengawasan ekstra agar tetap menjaga kebersihan lingkungan.
- c. Kesadaran masyarakat dan pelaku pariwisata masih rendah: Minimnya kesadaran masyarakat dan pelaku pariwisata dalam mengelola sampah berbasis sumber dapat menghambat keberhasilan program PSBS.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di dinas pariwisata provinsi bali mengenai pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) di sektor pariwisata Kota Denpasar mendapat dukungan kuat dari berbagai kebijakan daerah. Kebijakan tersebut antara lain Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, Pergub Nomor 47 Tahun 2019 mengenai PSBS, serta Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. Dalam praktiknya, Dinas Pariwisata aktif melakukan pemantauan penerapan PSBS di hotel, restoran, kafe, objek wisata, dan desa wisata. Mereka juga rutin memberikan edukasi tentang pemilahan sampah organik dan anorganik dengan memanfaatkan komposter, maggot, maupun teba modern.

Dinas Pariwisata memiliki sejumlah sumber daya pendukung seperti data lengkap tentang sektor horeka dan daya tarik wisata, serta komitmen pimpinan yang terwujud melalui kegiatan pemantauan dan edukasi yang dilaksanakan secara konsisten dari Agustus hingga Oktober 2025. Selain itu, kerja sama lintas instansi juga dilakukan, terutama dengan DKLH dan Diskominfo Provinsi Bali dalam mengembangkan dan menyebarkan Sistem Informasi Pemahaman Kedas (SIPADAS) berbasis web kepada pelaku usaha pariwisata di seluruh kabupaten/kota. Meski terbentur keterbatasan anggaran dan jumlah SDM, koordinasi antarinstansi berjalan efektif dan pelaku usaha mulai menunjukkan pemahaman yang lebih baik terkait pentingnya PSBS.

Peluang penerapan PSBS di industri pariwisata cukup besar menuju terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan. Hal ini terlihat dari semakin luasnya penggunaan botol minum isi ulang, pengurangan penggunaan pipet, kantong plastik, dan Styrofoam. Edukasi kepada wisatawan juga dilakukan melalui pembatasan air mineral sekali pakai serta imbauan membawa botol minum sendiri, termasuk pembatasan penggunaan pipet dan Styrofoam di berbagai restoran. Ancaman utama dalam penerapan PSBS muncul ketika pemilahan sampah tidak dilakukan dengan benar sehingga menyulitkan proses pengelolaan berikutnya. Namun secara keseluruhan, pelaku usaha pariwisata tidak menunjukkan penolakan dan justru semakin beradaptasi untuk mendukung penerapan PSBS.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kekuatan utama dalam penerapan PSBS di sektor pariwisata Kota Denpasar terletak pada dukungan regulasi yang jelas dan komitmen kelembagaan dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Dalam kerangka analisis SWOT, kondisi ini termasuk dalam faktor strength, karena kebijakan yang kuat memberikan legitimasi dan arah yang jelas bagi pelaksanaan program PSBS. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yanti, dkk. (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan PSBS sangat dipengaruhi oleh kejelasan regulasi dan peran aktif pemerintah daerah.

Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana prasarana masih menjadi weakness dalam implementasi PSBS. Ketidakkonsistenan pemilahan sampah di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik. Kondisi ini mendukung temuan Kalpikawati, dkk. (2023) yang menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan sampah berbasis sumber sangat bergantung pada kesiapan fasilitas dan keberlanjutan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Dari sisi peluang (opportunity), meningkatnya kesadaran pelaku usaha pariwisata terhadap isu lingkungan serta berkembangnya kerja sama dengan komunitas dan pihak

swasta membuka ruang bagi penguatan penerapan PSBS. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem pencatatan dan pemantauan pengelolaan sampah, juga berpotensi meningkatkan efektivitas program jika diterapkan secara optimal. Hal ini sejalan dengan pandangan Sudiana, dkk. (2025) yang menyebutkan bahwa manfaat ekonomi dan dukungan teknologi dapat menjadi faktor pendorong keberhasilan PSBS.

Sementara itu, peningkatan jumlah wisatawan dan pertumbuhan industri pariwisata menjadi threat yang dapat memperbesar volume timbulan sampah jika tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang memadai. Ancaman ini menunjukkan bahwa penerapan PSBS tidak hanya membutuhkan kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga pengawasan yang konsisten serta integrasi antarinstansi. Oleh karena itu, strategi pengelolaan sampah berbasis sumber perlu dirumuskan secara komprehensif dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, sekaligus meminimalkan kelemahan dan ancaman dalam pelaksanaannya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) pada sektor pariwisata di Kota Denpasar masih menghadapi berbagai tantangan yang saling berkaitan. Permasalahan utama terletak pada keterbatasan fasilitas pendukung, seperti alat pemilahan dan sarana pengolahan yang belum merata di seluruh kawasan wisata. Sosialisasi yang belum konsisten juga membuat sebagian masyarakat dan pelaku usaha belum memahami pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya.

Selain itu, lemahnya pengawasan dan belum optimalnya penegakan aturan menyebabkan pelaksanaan kebijakan PSBS tidak berjalan sesuai harapan. Meskipun demikian, dukungan regulasi dari Pemerintah Provinsi Bali serta meningkatnya kepedulian sebagian pelaku pariwisata menunjukkan bahwa PSBS memiliki potensi besar untuk diterapkan secara berkelanjutan. Dengan perencanaan yang lebih matang, koordinasi lintas instansi, dan pelibatan masyarakat, PSBS dapat menjadi upaya strategis dalam mengurangi beban TPA dan menjaga kualitas lingkungan pariwisata Bali.

## **Saran**

### **1. Penguatan dan Pemertahanan Kekuatan (Strength)**

Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pariwisata perlu mempertahankan serta memperkuat kekuatan internal yang telah dimiliki, terutama dukungan regulasi dan komitmen kelembagaan dalam penerapan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS). Kebijakan seperti Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 perlu diimplementasikan secara konsisten melalui pemantauan dan pendampingan berkelanjutan di seluruh destinasi wisata. Struktur organisasi yang berjalan efektif dan kompetensi sumber daya manusia yang ada perlu terus dioptimalkan sebagai penggerak utama dalam membangun budaya pengelolaan sampah berbasis sumber di sektor pariwisata.

### **2. Perbaikan Kelemahan Internal (Weakness)**

Untuk mengatasi kelemahan berupa keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan sosialisasi program PSBS, Dinas Pariwisata perlu meningkatkan penyediaan fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah secara merata di kawasan wisata. Upaya ini dapat didukung melalui penguatan kerja sama dengan pihak swasta, komunitas lingkungan, dan pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, strategi sosialisasi perlu dilakukan secara lebih intensif dan berkelanjutan dengan pendekatan yang inklusif, baik melalui media digital maupun pelibatan desa adat dan tokoh masyarakat, agar pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha serta masyarakat terhadap PSBS dapat meningkat.

### **3. Pemanfaatan Peluang (Opportunity)**

Peluang meningkatnya kesadaran lingkungan di kalangan pelaku usaha pariwisata dan wisatawan perlu dimanfaatkan dengan mendorong penerapan standar ramah lingkungan secara lebih luas. Dinas Pariwisata dapat memfasilitasi pengembangan nilai tambah ekonomi dari pengelolaan sampah, seperti penguatan bank sampah, kerja sama dengan pengelola daur ulang, serta pengembangan produk ekonomi kreatif berbasis limbah. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem pencatatan dan pemantauan pengelolaan sampah berbasis digital, perlu dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan PSBS.

### **4. Antisipasi Ancaman (Threat)**

Dalam menghadapi ancaman berupa peningkatan jumlah wisatawan dan pertumbuhan industri pariwisata yang berdampak pada meningkatnya timbulan sampah, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan penegakan aturan secara konsisten. Dinas Pariwisata perlu meningkatkan koordinasi lintas instansi agar pengelolaan sampah dapat berjalan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Selain itu, edukasi berkelanjutan kepada pelaku usaha pariwisata dan wisatawan perlu terus dilakukan untuk mencegah rendahnya kesadaran dan kepatuhan yang dapat menghambat keberhasilan penerapan PSBS di sektor pariwisata Kota Denpasar.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adnyana, Y., Sulandari, S., & Astawa, I. W. (2023). Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(1), 57-64.
- Bali, I. A. K. P. P. Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Mendukung Desa Wisata Berkelanjutan (Studi Kasus Desa Wisata Taro, Bali). <https://sipsn.kemendh.go.id/sipsn/public/data/capaian>
- PERATURAN GUBERNUR BALI. NOMOR 47 TAHUN 2019. TENTANG. PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER. <https://dklh.baliprov.go.id/wp-content/uploads/2020/07/23.-Pergub-47-TH-2019-compressed.pdf>
- Pradnyana, I., & Kusmana, D. (2024). EFEKTIVITAS PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI (Doctoral dissertation, IPDN).
- Suanda, I. W., Rusmayanthi, K. I., Sumada, I. M., & Alit, D. M. (2025). Sosialisasi Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Sumber dengan Pembuatan 'Tebe Modern' pada Peserta Didik SMP Dharma Praja Badung. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat AKSES*, 16.
- Sudiana, I. K., Sastrawidana, I. D. K., & Widiasih, N. N. (2025). ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER DI KECAMATAN BULELENG. *ECOTROPHIC: Jurnal Ilmu Lingkungan (Journal of Environmental Science)*, 19(1), 68-80.
- Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/surat-edaran-gubernur-bali/29361>
- Widjanarko, T. B., Marthalina, S., & Marthalina, S. (2024). STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGATASI MASALAH SAMPAH DI KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI (Doctoral dissertation, IPDN).
- Yanti, A.A.I.E.K., Sudantra, I.K., & Dahana, C.D. (2025). Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber: Studi Desa Adat di Bali. Kertha Semaya.